

# Seusai SNMPTN

Oleh ALEX SOBUR

"Anak saya lulus SNMPTN," kata kawan saya, Sabtu kemarin. Hebat. Wajah kawan saya benar-benar sumringah hari itu. Kami bertiga lalu bergegas naik angkot. Sekilas saya lihat anak kawan saya membawa beberapa lembar Koran "PR" yang memuat namanya dalam daftar lulus. Duduk di antara deretan penumpang lain yang berdesakan, di angkot yang meluncur sepanjang jalan Ledeng-Cicaheum, wajah gadisnya yang bulat kekanak-kanakan dan terus-menerus tersenyum mendorong seorang ibu bertanya (sambil melirik koran di tangannya).

"Pengumuman SNMPTN, Nak?"

"Ya, Bu."

"Kamu lulus?"

"Ya, alhamdulillah."

"Wah, masuk mana?"

"(PTN anu)."

"Waduuuh, selamat, ya!"

\*\*

Sepenggal cerita di atas mungkin akan selalu kita saksikan setiap memasuki tahun ajaran baru di perguruan tinggi negeri (PTN), meski dalam nuansa yang agak berbeda. Kini, para peserta SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri) yang dinyatakan lulus boleh bernapas lega. Bagi sebagian peserta SNMPTN, menunggu hasil ujian itu pun merupakan saat-saat yang menegangkan, malah tak mustahil bisa menimbulkan stres.

Seperti diberitakan "PR" (1/8), sebanyak 8.608 atau 34 persen dari 25.378 peserta SNMPTN 2009 Lokal Bandung diterima di empat PTN di Kota Bandung (ITB, Unpad, UPI, dan UIN SGD). Secara nasional, daya tampung SNMPTN 2009 sebanyak 100.235 orang dan yang diterima adalah 92.511 orang.

Bisa kita mengerti kalau sebagian calon mahasiswa banyak yang mengambil langkah "terobosan" selama masa menegangkan itu. Seraya menunggu pengumuman hasil SNMPTN, mereka mendaftarkan diri ke perguruan tinggi swasta (PTS) pilihannya. Langkah "terobosan" itu harus mereka lakukan, sebab ada PTS yang sudah menutup pendaftarannya justru pada saat hasil SNMPTN baru diumumkan.

Memang, jika kita hanya melihat dari segi tempat dan mutu pendidikan, sebetulnya para calon mahasiswa tidak usah berdesak-desakan di pintu PTN yang memang terbatas itu. Mereka bisa langsung mendaftarkan diri ke PTS sesuai dengan bidang studi yang diminatinya. Namun, harus pula kita akui, masalahnya tidaklah sesederhana itu. Banyak calon mahasiswa terpaksa berjejal di pintu PTN, sebab PTN menjanjikan banyak hal. Selain fasilitas dan pengajar yang memadai, yang terpenting adalah biaya di PTN relatif lebih rendah dibandingkan dengan di PTS.

Selain karena pertimbangan biaya, tidak sedikit orang tua calon mahasiswa merasa "malu" mengatakan putra atau putri mereka kuliah di PTS. Hal ini bisa kita mengerti karena persepsi masyarakat terhadap PTS pada umumnya lebih condong bernada "minor" alias negatif. Konstelasi dalam budaya kita tampaknya masih berorientasi pada pemerintah -- menjadi priayi itu tujuan hidup, menjadi pegawai negeri itu bergengsi, menjadi pejabat itu lebih dihormati, dan sebagainya. Persepsi seperti ini berbeda dengan persepsi di negara maju seperti Amerika Serikat, mahasiswa dan orang tua merasa bangga bila mereka atau anaknya kuliah di Universitas Harvard, Universitas Yale, Universitas Georgetown, dan sebagainya, yang notabene masuk dalam kategori PTS ngetop. Bahkan, menurut Dardjowidjojo (1992), pakar linguistik kita yang merampungkan studi S3-nya pada Universitas Georgetown, dari sekitar 1.500 PT di AS, 36 yang terbaik semuanya adalah PTS, sehingga orang tua mahasiswa di AS bangga kalau bisa berkata, "My son goes to Harvard (Yale, Princeton)."

\*\*

Dunia pendidikan tinggi di tanah air kita belakangan ini terus mengalami perkembangan dan perubahan yang besar. Di satu pihak, PTN terus berupaya meningkatkan daya tampung penerimaan mahasiswa baru, namun di lain pihak arus ledakan siswa SMA yang ingin memasuki perguruan tinggi mengalir deras. Ini menyebabkan PTN selalu kewalahan.

Guna mengatasi ledakan ini, pemerintah sejak lama memberi peluang kepada swasta untuk turut membantu menyerap, menampung, dan menyelenggarakan pendidikan tinggi. Akan tetapi, sebegitu jauh, tampaknya perkembangan PTS masih kurang menggembirakan. Ini, misalnya, terlihat dari jumlah PTS yang ada yang bisa dikualifikasikan memenuhi persyaratan dan standar minimal penyelenggaraan PTS.

Sebenarnya, PTS mempunyai lebih banyak peluang untuk maju lebih cepat. Berbeda dengan PTN, PTS bisa melangkah maju sendiri-sendiri sehingga keputusan apa pun yang dianggap mendesak bisa cepat diambil dan segera dilaksanakan. Jika PTS merasa perlu dan punya kemampuan menaikkan gaji dosen atau membayar gaji ke-13, kapan saja hal ini bisa dilaksanakan tanpa harus memikirkan dampak ekonomi bagi negara secara keseluruhan.

Selain itu, karena secara internal PTS adalah independen maka dinamikanya tentu lebih besar. Jika diperlukan adanya perubahan peraturan, misalnya, cukup beberapa orang dari PTS itu yang berkumpul untuk membahasnya.

Berdasarkan gambaran tersebut, PTS sebenarnya memiliki potensi besar untuk maju, hanya ada berbagai masalah yang lebih bersifat internal sebelum kemajuan itu bisa dicapai. Masalah internal itu umumnya menyangkut ihwal pengelolaan dalam PTS itu sendiri, yang tidak bisa terlepas dari peran atau keterlibatan yayasan sebagai badan hukum yang sekaligus merupakan pendiri atau "pemilik" PTS. Sementara PTS sendiri berperan sebagai unit pelaksananya. Di sini, antara PTS dan yayasan harus memperoleh kejelasan mengenai hak, kewajiban, wewenang, serta teritori masing-masing.

Bila masalah ini bisa disikapi secara arif maka konflik internal yang kerap terjadi antara yayasan dan pimpinan PTS dapat dihindarkan. Hal itu secara tidak langsung juga mengandung makna bahwa manajemen suatu PTS tidak berlandaskan pada filosofi "semua bisa diatur" tetapi harus pada pandangan "semua sudah diatur".

Jika "semua sudah diatur", akan tiba masanya nanti banyak orang tua calon mahasiswa di Indonesia dengan bangga berkata, "Anak saya lulus di (PTS anu)." \*\*\*

Penulis, dosen Ilmu Jurnalistik Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung (Fikom Unisba), asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

*Sumber:*

<http://newspaper.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=90371>